

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Jepang merupakan salah satu negara Asia Timur yang lahir sebagai salah satu negara maju, baik dalam ekonomi industri maupun kekuatannya dalam bidang politik militer yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebudayaannya. Selama ini Jepang dikenal sebagai negara dengan berbagai kebudayaan yang khas dan unik. Upacara minum teh, kebudayaan samurai, sumo, balutan khas kimono, geisha menjadi aset kebudayaan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi Jepang. Dalam perkembangannya geisha melahirkan pro dan kontra tersendiri di kalangan masyarakat Internasional. Namun sebagai salah satu produk kebudayaan, geisha dimanfaatkan oleh Jepang sebagai sarana diplomasi kebudayaan. Hal ini merupakan hal yang baru dalam Ilmu Hubungan Internasional, yang belum pernah di angkat sebagai judul skripsi. Oleh karena itu, perkembangan kebudayaan ini sangat menarik untuk dibahas dan dicermati sebagai sarana Diplomasi Kebudayaan. Karena uraian yang diungkap diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan memilih “Pasang Surut Peran Geisha Sebagai Media Diplomasi Kebudayaan Jepang (1603-1912)” sebagai judul skripsi. Akhirnya ketersediaan bahan dan sumber data yang diperlukan merupakan faktor pendukung yang sangat penting dan menunjang dalam penelitian ini. Sehingga dengan tersedianya bahan dan data tersebut akan membantu terselesaikannya tulisan ilmiah ini.

B. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pasang surut peran Geisha sebagai media Diplomasi Kebudayaan Jepang selama kurun waktu 1603 hingga 1912 pada periode Tokugawa dan era Meiji..
2. Sebagai perwujudan teori-teori yang penulis terima dibangku kuliah, yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan serta untuk membuktikan hipotesa-hipotesa yang telah dibuat.
3. Untuk memenuhi persyaratan meraih gelar kesarjanaan strata satu (S-1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagai sebuah bangsa yang era modernnya relative baru saja dimulai, kini Jepang telah berubah menjadi negara yang berhasil menyejajarkan diri dengan negara-negara maju di Barat. Hegemoni yang dilakukan oleh Jepang selain dilakukan melalui bidang ekonomi industri juga dilakukan melalui kebudayaan. Kebudayaan oleh masyarakat Jepang dipandang sebagai salah satu falsafah/ landasan yang tetap harus dilestarikan seiring dengan kemajuan dan kemodernnannya dalam bidang politik, ekonomi serta pertahanan dan keamanannya. Kebudayaan-kebudayaan tersebut bagi masyarakat Jepang merupakan aset, modal dan kekuatannya untuk dapat menjadi satu negara yang memiliki power ditengah arus globalisasi ini. Sehingga pada akhirnya dapat

mengantarkan Jepang menjadi salah satu dari empat negara adidaya ekonomi di dunia bersama AS, Jerman dan Inggris. Bahkan menjadi satu negara yang utama di luar Eropa dan Amerika karena telah menanamkan miliaran dolar AS di seluruh dunia.

Pada perkembangan politik, Jepang mulai terbentuk oleh sistimnya sendiri pada masa Tokugawa (1603-1868). Pada masa ini pemerintah Tokugawa memberlakukan sistim isolasi. Yaitu Jepang tertutup oleh negara lain. Pada masa tersebut Jepang tidak melakukan hubungan dengan orang asing, segala siklus baik politik maupun ekonomi hanya terjadi dalam level lokal dalam negeri saja. Karena sistim isolasi tersebut, maka Jepang dapat berkembang sebagai bangsa yang kaya akan kebudayaan. Ketika itu tidak ada pengaruh budaya lain yang bisa masuk ke Jepang, sehingga budaya nenek moyang bisa tumbuh dan berkembang secara pesat.

Èra modernisasinya dimulai ketika Restorasi Meiji pada tahun 1868. Masa ini merupakan satu periode dimana Jepang memulai upayanya dalam modernisasi, khususnya industrialisasi. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah dalam pembangunan industri, khususnya dalam pembangunan pabrik-pabrik dan dok-dok perkapalan. Perkembangan tersebut membawa Jepang menjadi sebuah negara industri maju di kawasan Asia Timur, yang hasil produksinya membanjiri pasaran dunia. Sampai akhirnya ketika perang dunia I meletus, ketika negara-negara Barat merubah konsumsi mereka menjadi industri perang, Jepang dapat memenuhinya, hal tersebut semakin memperkuat posisi Jepang sebagai negara industri khususnya dikawasan Asia.

Pada perkembangannya, kelemahan dan perpecahan di dalam Cina dan Korea pada abad 19 menggoda pemimpin-pemimpin Jepang yang memang memiliki paham expansionisme, seperti yang diterapkan ketika pada masa pemerintahan Meiji untuk memanfaatkan moment tersebut. Jepang mulai menanamkan pengaruh politiknya di Cina melalui pengembangan perdagangan tekstilnya. Melalui pengaruh tersebut, pada akhirnya Jepang dapat merombak pola hubungan yang terdapat di Asia Timur, dengan hanya membuka peluang bagi Barat demi memajukan kepentingan Jepang sendiri. Keberhasilan ekspansi Jepang atas Korea, disusul dengan kemenangan Jepang dalam perang Rusia-Cina semakin memperlihatkan peran menonjol Jepang di pentas dunia. Bahkan ketika perang dunia I meletus, Jepang yang memihak kepada negara sekutu dapat menguasai pemerintah Cina dengan menempatkan penasehat Jepang disegala bidang, termasuk bidang militer. Hal tersebut berarti bahwa Jepang berhasil menjadikan Cina sebagai negara bonekanya, sehingga mempermudah Jepang untuk tetap menjalankan politik agresinya di Cina. Keadaan tersebut menempatkan posisi Jepang bersama negara-negara Barat, Inggris, Perancis dan AS seperti yang tertuang dalam perjanjian Washington (1911) sebagai penguasa Asia. Bagi Jepang ini merupakan kemenangannya atas wilayah Asia Timur.¹

Perlawanan bangsa Tionghoa atas agresi Jepang membuat Jepang mengubah arah peta perpolitikannya. Jepang mulai mengalihkan perhatiannya pada kawasan Asia Tenggara yang memiliki sumber alam yang berlimpah-limpah yang memang dibutuhkan oleh industri Jepang. Atas kepentingannya tersebut,

¹ Lie Tek Tjeng, *Studi Wilayah Pada Umumnya Asia Timur pada Khususnya*, IKAPI, Bandung, 1983, hal 361

Jepang mengadakan aliansi Jerman Hitler dan Itali Mussolini pada tahun 1941 yang kemudian melancarkan serangan terhadap Pearl Harbour dan berhasil menghancurkan angkatan laut AS, satu-satunya kekuatan yang dapat menentang agresi Jepang. Namun ternyata, akhir perang dunia II tidak membawa kemenangan seperti yang diharapkan Jepang. AS dan sekutunya tidak bersedia menerima kekalahan, sampai akhirnya AS dan sekutu dapat bertahan dengan mengerahkan seluruh potensi industriil yang dimiliki yang memang jauh melebihi potensi industriil Jepang. Sehingga Jepang tidak dapat menghindarkan kealahannya dalam perang dunia II.

Pasca Perang dunia II, kemajuan perekonomian Jepang dimulai ketika PM Ikeda mengambil kebijaksanaan untuk membangun Jepang di bidang ekonomi setelah hancurnya negara akibat pemboman Hiroshima dan Nagasaki yang merupakan simbol kekalahan Jepang pada perang dunia II. Jepang setelah PD II harus membayar ganti rugi perang dan harus mengubah Undang-undang Dasar Meiji menjadi Undang-undang dasar yang melambangkan kedemokrasian sesuai dengan ketentuan yang diajukan oleh Amerika. Keadaan tersebut membawa dampak buruk bagi masyarakat Jepang. Rakyat Jepang pada saat itu mengalami depresi karena perekonomian yang tidak stabil dan demokrasi yang harus diterapkan oleh masyarakat Jepang terutama dibidang politik dan pemerintahan. Sebelum Jepang kalah perang semua kekuasaan dibawah Kaisar Jepang. Namun

ketika Jepang mengalami kekalahan, pendudukan Amerika memaksa Jepang menerapkan sistem demokrasi yang ditetapkan oleh Amerika.²

Kekalahan Jepang pada PD II tersebut membawa Jepang pada posisi pendudukan tentara AS di bawah Jendral Mc Arthur. Selama masa pendudukan tersebut, tidak ada satupun politik luar negeri Jepang yang bersifat independent. Karena pada masa tersebut Jepang merupakan pion AS di Asia. Sehingga membawa Jepang masuk dalam kawasan payung keamanan AS. Hal ini seperti yang tertuang dalam konstitusi pemerintahan Jepang yang berdasar pada “Mac Arthur Draft”, yang menerapkan konsep-konsep dasar kedaulatan rakyat, hak asasi manusia dan anti perang. Dalam konstitusi tersebut disebutkan bahwa Jepang tidak diperbolehkan memakai kekuatan senjata untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan dunia Internasional. Hal ini dibuat AS dengan alasan agar Jepang tidak tumbuh sebagai negara fasis baru bersama Italia dan Jerman. Selama masa tersebut, secara politis segala kebijakan Jepang termasuk dalam pengaruh AS.³

Perubahan peta geopolitik Jepang membawa dampak-dampak dalam berbagai bidang yang lain, termasuk diantaranya adalah kebudayaan nasional Jepang. Pasca pemerintahan Tokugawa perkembangan kebudayaan Jepang sedikit banyak mengalami kemunduran. Bahkan beberapa kebudayaan cenderung mengalami degradasi. Salah satu produk budaya Jepang Geisha, budaya yang berkembang pesat pada jaman Edo/ Tokugawa yaitu saat Jepang tertutup dari

² F:\japan\explore japan\Inovasi Online Vol_6-XVIII-Maret 2006 - Awal Puncak Perekonomian Jepang.htm

³ opcit

dunia luar, berkembang menjadi satu kebudayaan yang dinilai secara negatif.⁴ Geisha berperan sebagai pekerja seni yang pada awalnya bercitra elegan dan borjuis lambat laun mengalami degradasi. Pembukaan Jepang untuk negara lain membawa dampak tersendiri bagi perkembangan budaya ini. Dan mengalami puncaknya ketika pasca Perang Dunia II. Setelah perang, banyak geisha kehilangan patron, terusir dari rumah- rumah mewah. Pelacur atau hostes di bar menyamar sebagai geisha. Para tentara GI Amerika yang menduduki Jepang saat itu sedikit-banyak memberi andil pada perubahan cara pandang ini, karena mereka semata-mata menempatkan geisha sebagai obyek sek-sual. Pada akhirnya dewasa ini, bahkan dalam masyarakat internasional, geisha dikenal sebagai seorang penghibur dan pelayan dalam makna negatif. Padahal, sebagiannya lagi berkiprah sebagai sosok seniman juga. Yaitu menghibur tamu lewat nyanyian dan tarian. Hanya, kesan geisha sebagai sosok penghibur dan pelayan dalam arti negatif lebih disorot bila dibandingkan perannya sebagai penyanyi dan penari.

Geisha merupakan salah satu kebudayaan Jepang yang dilestarikan bahkan dilegalkan oleh pemerintah Jepang secara lebih daripada sekedar fenomena yang selama ini dikenal negatif oleh publik Internasional. Geisha adalah produk budaya bangsa Jepang. Geisha lahir dari kultur budaya lama kaum borjuis Jepang. Geisha adalah seniman-penghibur (entertainer) tradisional Jepang. Dalam istilah lain, Geisha adalah penjaga kebudayaan tradisional Jepang. Perannya yang menonjol

⁴ <http://marian.creighton.edu/~marian-w/academics/english/japan/geisha/geisha.html>

dalam berbagai perjamuan nasional maupun internasional Jepang saat itu, mengangkat dan mengemas secara elegan berbagai tradisi dan budaya Jepang.⁵

Pemerintah Jepang membangun banyak tea house sebagai tempat berlangsungnya upacara tradisi minum teh, tradisi yang selalu dikedepankan dalam berbagai perjamuan nasional maupun internasional di Jepang, yang didalamnya geisha mempunyai peran yang menonjol. Biro perjalanan Jepang melakukan kampanye Internasionalnya, menggunakan poster-poster dengan menampilkan foto indah pagoda di kuil Toji, dengan pohon sakura disatu sisinya dan seorang geisha cantik disisi lainnya. Poster-poster tersebut terpasang dikota-kota besar diseluruh dunia, dipadu dengan kalimat “Datang dan Kunjungilah Negeri Matahari Terbit” dan tertuang dalam segala macam bahasa baik Inggris, Jerman, Prancis, Rusia dan beberapa bahasa Internasional lainnya.⁶ Dalam setiap pertemuan kenegaraan, kunjungan kepala negara, pertemuan bangsawan Inggris atau Jerman maupun miliuner Amerika ke Jepang lebih sering menggunakan geisha dalam setiap acara penyambutannya. Geisha-geisha tersebut memperlihatkan secara luwes tradisi dan kebudayaan Jepang, baik melalui balutan khas kimono, tarian, permainan tsutsumi, petikan shamisen, keahlian berkaligrafi, maupun melalui upacara tradisi minum teh. Latar belakang sebagai negara kekaisaran memperkuat posisi Jepang untuk tetap menjalani berbagai tradisi dan kebudayaannya itu.

Dewasa ini Jepang merupakan salah satu contoh model negara yang sukses dalam modernisasinya dan sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi

⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Geisha>

⁶ Arthur Golden; *Memoars of a Geisha*, Gramedia Pustaka Utama 2006, hal 161

budayanya. Bagi Jepang dengan kebudayaan yang ada dinegaranya tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan negara-negara lain dalam rangka mencapai tujuannya, dan setidaknya dunia telah mengenal kesenian dan tingkat peradaban Jepang melalui geisha. Dalam masa tersebut, Geisha mampu mengangkat dan mengemas secara elegan berbagai tradisi dan budaya Jepang, berperab sebagai media dalam diplomasi kebudayaan Jepang.

Diplomasi kebudayaan merupakan salah satu upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam rangka pencapaian kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini pemerintah Jepang berupaya mendayagunakan seluruh aspek-aspek budayanya sebagai kekuatan nasional, yang salah satu diantaranya terkemas melalui geisha.

D. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah diurai diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah pasang surut perkembangan peran Geisha sebagai media Diplomasi Kebudayaan Jepang khususnya pada masa Tokugawa dan masa Meiji?

E. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Untuk dapat menganalisa pokok permasalahan yang ada, penulis mencoba menerapkan beberapa konsep dalam Ilmu Hubungan Internasional. Hal ini dimaksudkan agar pengkajian masalah ini semakin terarah dan terkonsep dengan jelas. Adapun konsep yang penulis gunakan untuk mengkaji dan meneliti

fenomena kebudayaan geisha Jepang tersebut adalah konsep Diplomasi Kebudayaan dan Kepentingan Nasional.

1. Konsep Diplomasi Kebudayaan

Dalam sistem Hubungan Internasional dewasa ini, diplomasi kebudayaan merupakan bagian atau salah satu jenis dari berbagai macam bentuk diplomasi yang dapat diterapkan oleh suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Diplomasi diartikan sebagai seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam berhubungan dengan negara lain, namun apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya.⁷ Sedangkan kebudayaan berdasarkan ilmu antropologi berarti adalah keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar ini merupakan satu dimensi bagi soft policy ataupun diplomasi suatu negara dalam hubungannya dengan masyarakat internasional.⁸ Kebudayaan yang tercakup dalam segala unsurnya tersebut baik berupa bahasa, system pengetahuan, organisasi social, system peralatan hidup dan teknologi, system mata pencaharian hidup, system religi maupun kesenian merupakan kesatuan yang terintegrasi yang bersifat universal. Seluruh tindakan manusia adalah

⁷ S.L. Roy, *Diplomasi, Terjemahan Harwanto dan Mirsawati*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 95

⁸ Kunjtjaraningrat, *Pengantar Antropologi Budaya*, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hal 180

kebudayaan yang satu dan lainnya saling berkaitan membentuk suatu sistem, baik itu berupa ide/ gagasan, aktivitas maupun kesenian.

Diplomasi kebudayaan dapat diartikan sebagai sebagai diplomasi yang memanfaatkan aspek kebudayaan sebagai sarana dalam mencapai kepentingan nasional. Dalam artian mikro, kebudayaan dapat termanifestasikan melalui pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan dan olahraga. Sedang secara makro sesuai dengan ciri-ciri khas yang utama, misalnya: propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai upaya bukan politik, ekonomi maupun militer.⁹ Diplomasi kebudayaan menjadi salah satu bentuk diplomasi bagi suatu negara, karena melalui diplomasi kebudayaan ini akan melahirkan satu citra yang lebih positif, sehingga mampu memberikan penghargaan serta penghormatan tersendiri bagi suatu negara.

Diplomasi kebudayaan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, individual maupun kolektif atau setiap warga negara. Pola hubungan diplomasi kebudayaan antar bangsa dapat terjadi antar siapa saja, baik itu pemerintah-pemerintah, pemerintah swasta, swasta-swasta, individu-individu, pemerintah-individu dan lainnya, dengan tujuan dan sasaran utama adalah untuk mempengaruhi pendapat umum, baik pada level nasional maupun internasional. Materi Diplomasi Kebudayaan adalah segala hal yang secara makro maupun mikro dianggap sebagai pendayagunaan aspek budaya

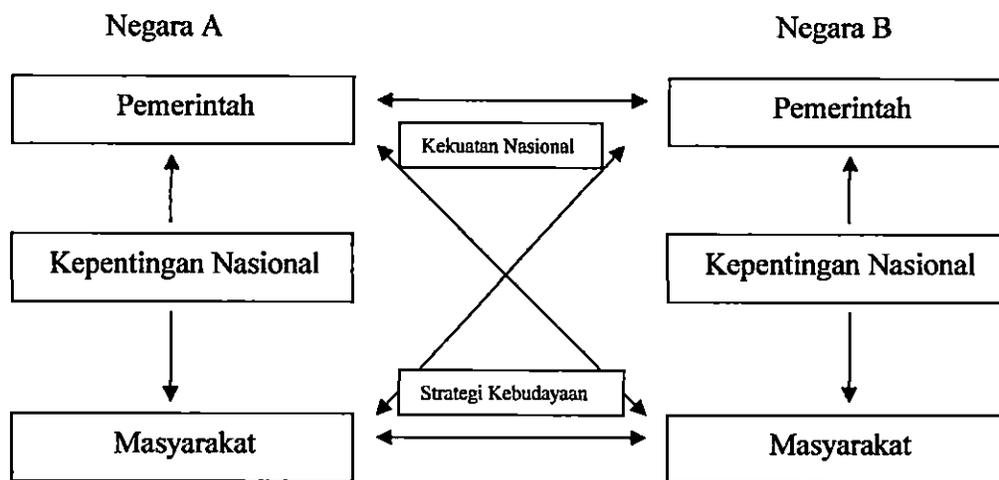
⁹ Warsito Tulus, Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan, Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, 2007, hal 3

(dalam politik luar negeri), antara lain: kesenian, pariwisata, olahraga, tradisi, teknologi sampai dengan pertukaran ahli dan sebagainya.¹⁰

Secara umum, tujuan Diplomasi Kebudayaan adalah memelihara perdamaian tanpa merusak kepentingan nasional, hal ini dapat dijelaskan melalui skema berikut ini :

Gambar I.1

Hubungan Diplomasi Kebudayaan antar negara



Sumber : Warsito Tulus, Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan, Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, 2007, hal 17

Keterangan :

Setiap negara dalam rangka dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional selalu mengoptimalkan sumber daya nasional (kekuatan nasional) yang diantaranya tercakup dalam pemanfaatan kebudayaan. Seluruh

¹⁰ *Ibid*, hal 5

kekuatan dibidang kebudayaan tersebut di rekayasa dalam strategi kebudayaan.

Berdasarkan pada gambar I.1 tentang hubungan diplomasi kebudayaan antar negara tersebut berarti bahwa negara Jepang dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional mengoptimalkan sumber daya nasional (kekuatan nasional) yang dimilikinya. Pada masa Tokugawa, kebudayaan yang termanifestasikan melalui kesenian merupakan satu-satunya kekuatan nasional yang dimiliki Jepang. Maka pemerintah Jepang mengoptimalkan pemanfaatan kekuatan nasional tersebut dengan mengemasnya dalam berbagai strategi kebudayaan. Salah satu strategi kebudayaan tersebut terwujud melalui geisha. Geisha yang merupakan orang yang berkemampuan seni dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang sebagai alat untuk pencapaian kepentingan nasionalnya. Pada masa tersebut geisha merupakan media yang dominan yang digunakan oleh Jepang dalam pelaksanaan diplomasi kebudayaan. Geisha sebagai pelaku seni dapat dikatakan sebagai diplomasi kebudayaan, karena di dalamnya terkandung erat unsur budaya. Geisha dalam melakukan perannya di bidang seni, sarat dengan tradisi-tradisi bangsa yang dijalani oleh bangsa Jepang. Geisha bergelut dalam bidang seni yaitu seni musik, seni tari, seni peran dan seni suara. Dengan misi kesenian tersebut Geisha mempunyai peranan penting, yaitu sebagai pelaku seni yang oleh Jepang digunakan sebagai upaya untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi dan kebudayaan bangsa sehingga pada akhirnya dapat menjadi icon tersendiri bagi negara Jepang.

Sebagai bangsa yang telah maju peradabannya pada era Meiji, Jepang harus tetap mengupayakan agar nilai-nilai tradisi dan budaya bangsa tidak begitu saja pudar digantikan dengan budaya yang lebih didominasi budaya barat. Bagaimanapun juga, Jepang merupakan bangsa Timur yang memiliki dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan budayanya. Apalagi dengan posisi Jepang sebagai negara kekaisaran, yang masih kental dalam menjalani tradisi-tradisi tersebut. Modernisasi memberikan dampak bagi perkembangan geisha. Walaupun pada perkembangannya Geisha memiliki citra yang cenderung negatif di dunia internasional tetapi pemerintah Jepang pada waktu tersebut tetap mempertahankan budaya Geisha. Pada masa Meiji, strategi kebudayaan yang digunakan dalam pelaksanaan diplomasi kebudayaan tidak hanya terbatas pada unsur mikro kesenian saja. Hal ini menyebabkan peran geisha sebagai media diplomasi kebudayaan Jepang menurun. Jepang hanya menggunakan geisha sebagai alat untuk menjaga kebudayaan tradisional Jepang dari penetrasi budaya asing. Walaupun bukan sebagai media yang utama, geisha tetap digunakan sebagai sarana penunjang bagi pelaksanaan diplomasi kebudayaan Jepang.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional dikenal sebagai salah satu konsep yang paling populer di dalam studi ilmu Hubungan Internasional. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional (national interest) adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat

keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur dasar yang menjadi kebutuhan vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.¹¹

Kepentingan nasional dalam arti sempit diartikan sebagai kesejahteraan umum, hak perlindungan hukum dan kepentingan mempertahankan kelangsungan hidupnya yang berarti mempertahankan politik dan identitas budayanya. Menurut Morgenthau, kemampuan minimum negara bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik dan cultural. Dalam pengertian yang lebih spesifik yaitu negara bangsa harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya sebagai identitas fisiknya, mempertahankan rezim ekonomi politiknya, sebagai identitas politiknya, serta memelihara norma-norma etnis, religius, linguistic dan sejarahnya sebagai identitas budayanya.¹²

Oleh karena itu para pengambil keputusan di suatu negara akan sangat berpihak terhadap kepentingan Nasionalnya untuk dapat melindungi dan mempertahankan identitas-identitasnya. Hal tersebut dilakukan untuk survival, atau kelangsungan hidupnya sebagai negara. Karena didalam politik dunia Internasional terdapat persaingan antar negara maupun bangsa untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya di dunia. Kepentingan Nasional

¹¹ Jack C. Plano, Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, terjemahan Wawan Juanda, Third Edition, Clio Press Ltd, England, 1982, hal 7.

¹² Mochtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal 141

bukan hanya kepentingan negara namun juga kepentingan bangsa, yang hal tersebut ingin dicapai untuk mewujudkan keinginan bersama suatu bangsa atau negara, seperti kesejahteraan rakyatnya serta untuk dapat berkuasa di dunia.

Serta menurut pemikiran-pemikiran dasar rakyat, kepentingan nasional adalah berarti adanya kebebasan, ketertiban, keamanan, kemerdekaan, kedaulatan, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan bagi kehidupan bangsa. Sehingga kepentingan nasional termasuk kedalam visi dan diperjuangkan oleh suatu bangsa atau negara untuk kemudian dipergunakan dalam rangka ketertiban internasional, hal ini dibuat dalam rangka merumuskan politik luar negeri suatu negara.

Jepang telah melampaui dua periode pemerintahan yang masing-masing memiliki kebijakan yang berbeda, khususnya dalam hubungannya dengan negara lain. Masa Tokugawa disinyalir merupakan periode dimana pemerintah Jepang memberlakukan peraturan yang sangat ketat dalam melakukan hubungan dengan pihak asing, baik itu yang bersifat institusi kelembagaan negara maupun individu perorangan masyarakat Jepang. Subversi kaum Kristen pada masa tersebut telah memasuki tahap mengancam kehidupan sosial politik Jepang. Agama ini memberikan pengaruh yang merugikan dan mengancam identitas kultural Jepang. Di beberapa wilayah, melalui sikapnya yang radikal dan tidak toleran kaum Kristen telah melakukan campur tangan dalam kehidupan politik, selain itu agama asing ini juga menganjurkan masyarakat untuk menanamkan kesetiaan kepada seorang

penguasa asing, Paus di Roma.¹³ Hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai kultural bangsa Jepang. Jepang merupakan tanah bagi dewa-dewa (agama Shinto) dan bagi mereka kesetiaan tertinggi harus diberikan kepada kaisar Jepang sebagai manifestasi dewa dimuka bumi. Maka pemerintah Tokugawa menerapkan sistim isolasi, negara Jepang tertutup untuk akses orang-orang asing.

Berbeda halnya ketika Jepang memasuki era Meiji. Keberhasilan dan kemajuan Eropa kemudian membuka mata Jepang bahwa kekuatan yang sebenarnya untuk tetap mempertahankan eksistensi negara dari ancaman asing adalah kesejahteraan serta pertahanan negara. Perubahan besar dilakukan pemerintah Meiji. Orientasi kepentingan nasional Jepang bukan lagi semata-mata mempertahankan identitas kultur tetapi juga ingin membangun kekuatan ekonomi dengan basic pertahanan militer yang kuat. Kenyataan bahwa Eropa lebih unggul dari China membuat Jepang merasa harus meniru sistim Barat ini. Meiji mengadopsi semua kebijakan yang diterapkan barat dengan melakukan westernisasi disemua bidang. Pengendapan budaya yang telah terjadi selama kurun waktu 250 tahun lebih memberikan kemantapan budaya, sehingga dengan adanya westernisasi ini tidak mengancam nilai-nilai tradisi dan budaya nenek moyang Jepang.

Pada masa Tokugawa Identitas kultur yang dimiliki Jepang menjadi salah satu dasar bagi para pembuat keputusan Jepang dalam menentukan arah kebijakan politiknya. Kebudayaan tersebut menjadi satu elemen penting, dan

¹³ W.G Beasley, *Pangalaman Jepang: Sejarah Singkat Jepang*, Ed 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal 187

Geisha sebagai seorang pelaku seni yang juga berperan sebagai penjaga tradisi budaya bangsa Jepang menjadi alat yang digunakan oleh pemerintah Jepang dalam rangka pencapaian kepentingan nasionalnya. Karena melalui Geisha, Jepang dapat mengedepankan berbagai tradisinya tersebut, memperlihatkan kepada masyarakat internasional betapa luhur dan mengakarnya peradaban bangsa Jepang sebagai identitas suatu bangsa dan juga geisha merupakan alat yang digunakan sebagai penjaga tradisi budaya bangsa dari pengaruh westernisasi yang mungkin muncul. Hal ini berarti bahwa pemerintah Jepang dalam mencapai kepentingan nasionalnya menggunakan media Geisha.

Selain itu, adanya Geisha merupakan icon positif bagi Jepang pada masa Tokugawa. Bagi Jepang Geisha merupakan wakil terdepan kebudayaan Jepang yang mengemas secara elegan dan borjuis tradisi nenek moyang bangsa Jepang. Icon positif tersebut akan mampu memberikan citra Jepang di mata publik internasional. Melalui Geisha masyarakat akan mengenal Jepang sebagai negara yang kaya akan kesenian dan kebudayaan bangsa. Walaupun pada akhirnya, ketika pada era Meiji Jepang telah berkembang sebagai negara maju yang lebih menitik beratkan perekonomian melalui industrinya, namun tidak dipungkiri bahwa keelokan serta keunikan budaya Jepang tetap merupakan daya tarik bagi masyarakat internasional. Geisha menjadi salah satu komoditas Jepang pada masa tersebut. Banyaknya pedagang, pengunjung yang datang dari berbagai pelosok dunia tentu akan menambah tingkat pendapatan devisa negara Jepang. Walaupun publik lebih menyorot perannya

secara negatif namun geisha tetap dipertahankan sebagai budaya yang luhur bagi masyarakat Jepang.

F. HIPOTESA

Dengan melihat permasalahan yang telah diurai diatas dan didukung konsep yang dianggap dapat membantu analisa, maka penulis mengambil hipotesa sebagai berikut:

1. Pada periode Tokugawa, Diplomasi kebudayaan yang termanifestasikan dalam kesenian merupakan pilihan yang dominan bagi pemerintah Jepang. Geisha berperan sebagai pelaku seni serta menjadi icon positif bagi Jepang dalam rangka pelaksanaan Diplomasi Kebudayaan.
2. Pada masa Meiji, Diplomasi Jepang termanifestasikan dalam banyak bentuk, sehingga peran geisha dalam diplomasi kebudayaanpun menurun seiring dengan menurunnya status sosialnya, hanya merupakan alat yang digunakan untuk menjaga tradisi kebudayaan.

G. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat Library Reseach atau bersifat studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, buku, artikel, surat kabar, majalah, internet serta berbagai media lain. Dan sumber-sumber lain yang relevansi yang akan menjadikan penelitian ini bersifat ilmiah.

Sedangkan metode penulisan yang akan penulis gunakan adalah deskriptif dan argumentative, dalam artian agar dapat memberikan gambaran serta menjawab pokok permasalahan tersebut.

H. JANGKAUAN PENELITIAN

Pembatasan penelitian dimaksudkan agar obyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, juga agar dalam pembahasan dan pengkajian pokok permasalahannya tidak terjadi penyimpangan. Untuk mempermudah penelitian dan menghindari kesulitan dalam mencari data maka penulis menggunakan batasan, bahwa jangkauan diplomasi kebudayaan Jepang yang didukung oleh budaya Geisha ini membahas seputar masalah pasang surutnya budaya geisha serta peran Geisha sebagai media diplomasi kebudayaan Jepang pada level internasional dimulai dari tahun 1603 hingga 1912. Dengan pertimbangan bahwa tahun 1603 merupakan awal pemerintahan Tokugawa dimana disinyalir merupakan awal lahir dan berkembangnya geisha, dan 1912 merupakan akhir dari pemerintahan Meiji, yaitu masa dimana geisha mengalami degradasi.

Selain itu apabila ada pembahasan masalah-masalah yang ada diluar jangkauan waktu yang ditetapkan, selama masih ada korelasi dan relevansinya akan penulis cantumkan dengan maksud sebagai tinjauan historis serta untuk menjelaskan uraian yang dimaksud.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini akan terbagi kedalam lima bab, hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan ini dapat dibahas secara teratur serta saling berkaitan menuju pokok permasalahan, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB. I

Merupakan pendahuluan yang meliputi penjelasan mengenai alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Menjelaskan mengenai sejarah lahir dan berkembangnya Geisha sebagai salah satu produk kebudayaan bangsa Jepang pada masa Tokugawa dan Meiji.

BAB III

Menjelaskan tentang gambaran kebudayaan Jepang dan politik kebudayaan yang diterapkan oleh negara Jepang pada masa Tokugawa dan era Meiji.

BAB IV

Menjelaskan tentang pasang surutnya peran Geisha sebagai media Diplomasi Kebudayaan Jepang pada masa Tokugawa dan Meiji.

BAB V

Merupakan rangkuman atau kesimpulan dari bab-bab pembahasan dan merupakan pembahasan terakhir serta penutup dari skripsi ini.